



ANALISIS TRANSPARANSI, EFEKTIVITAS, DAN EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS WEBSITE PEMERINTAH DAERAH SULAWESI TENGAH

**Abdul Razik Luneto¹, Annastry Widyakusuma², I Putu Edi Darmawan³, Immawan
Muhajir Kadim⁴**

Universitas Tadulako^{1,2,3}

IAIN Sultan Amai Gorontalo⁴

immawankadim@gmail.com⁴

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 19/06/2025

Direvisi : 25/06/2025

Disetujui : 30/06/2025

Keywords:

*Transparency of Financial
Management, Effectiveness of
Regional Finances of District/City
Governments*

Kata Kunci:

Transparansi Pengelolaan
Keuangan, Efektivitas Keuangan
Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota

ABSTRACT

This study examines the transparency, effectiveness, and efficiency of financial management in 13 district/city governments in Central Sulawesi using a descriptive qualitative approach with the content analysis method. Data were obtained from the official website of the regional government for the 2023 budget year and measured based on transparency indicators at the planning, implementation, and reporting and accountability stages of the APBD. The results of the study show that Banggai Laut Regency has the highest transparency index (98.28%), while Toli-Toli Regency has the lowest (27.59%). The average level of financial management effectiveness reaches 93%, categorized as effective, although there are disparities between regions. The main obstacles to transparency lie in limited infrastructure and human resource capacity. These findings emphasize the importance of technological support, human resource training, and provincial government policies to encourage transparency and accountability of regional finances in a sustainable manner.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji transparansi, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan pada 13 pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode content analysis. Data diperoleh dari situs resmi pemerintah daerah tahun anggaran 2023 dan diukur berdasarkan indikator transparansi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Banggai Laut memiliki indeks transparansi tertinggi (98,28%), sementara Kabupaten Toli-Toli terendah (27,59%). Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan rata-rata mencapai 93%, masuk kategori efektif, meskipun terdapat disparitas antar daerah. Kendala utama transparansi terletak pada keterbatasan infrastruktur dan kapasitas SDM. Temuan ini menegaskan pentingnya dukungan teknologi, pelatihan SDM, dan kebijakan pemerintah provinsi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Tujuan laporan keuangan pemerintah, sebagaimana diuraikan (PP) No. 71 Tahun 2010 dan Public Sector Committee – IFAC adalah menyediakan informasi relevan untuk pengambilan dan evaluasi keputusan (Bastian, 2010). Hal ini mencakup fungsi prediksi, pemantauan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja (Mardiasmo, 2009). Disisi lain, laporan keuangan pemerintah juga berperan sebagai alat akuntabilitas dan pertanggungjawaban kepada masyarakat (Sukran et al., 2020). Sistem desentralisasi pemerintahan di Indonesia menempatkan tanggung jawab besar pada daerah dalam mengelola sumber daya dan keuangannya, yang kerap berimplikasi pada kompleksitas laporan keuangan dan potensi kesenjangan informasi. Kesenjangan ini dapat memicu ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah daerah (Siregar & Muslih, 2018). Untuk meminimalisir kesenjangan informasi keuangan, meningkatkan kinerja, serta mewujudkan pemerintahan



yang transparan dan akuntabel, konsep *New Public Management* (Hood, 1995) dianggap esensial. Penggunaan konsep *New public management* (NPM) sangatlah penting dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Nurhadianto & Khamisah, 2019; Shin, 2001). Meskipun demikian, pemberian tanggungjawab yang sangat besar kepada pemerintah daerah memunculkan dua isu penting, yaitu; 1) kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam menjalankan struktur akuntabilitas, transparansi dan tatakelola dan 2) kapasitas lembaga, dalam hal ini berhubungan dengan regulasi serta aturan yang berlaku (Siagian *et al.*, 2016).

Transparansi mencakup ketersediaan dan aksesibilitas informasi untuk meningkatkan efektivitas manajerial (Araujo & Tejedo-Romero, 2016; Bonsón *et al.*, 2012; Hirsch & Osborne, 2000; Kim *et al.*, 2005), efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan melalui output, sedangkan efisiensi memaksimalkan output dengan minimal input (Koromath Paulus, 2020; Putri *et al.*, 2023; South *et al.*, 2016). Dalam pasal 4 ayat 1 PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, efisiensi, efektivitas dan transparansi didefinisikan sebagai penggunaan sumber daya minimal untuk hasil maksimal, pencapaian target program, dan akses informasi publik yang luas, masing-masing. Beberapa studi sebelumnya telah berupaya mengukur perkembangan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Penelitian Martani *et al.*, (2014) misalnya, melakukan pengukuran tingkat transparansi dan kinerja keuangan pemerintah daerah, menganalisis 491 situs pemerintah, dengan 429 situs yang dapat diakses. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat transparansi dan kinerja keuangan pemerintah daerah baru mencapai 15% (Martani *et al.*, 2014). Penelitian Ritonga & Syamsul (2016) secara spesifik mengkaji tiga aspek utama pengelolaan keuangan daerah: perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban APBD, menggunakan data APBD dari 34 provinsi di Indonesia tahun anggaran 2016. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat transparansi keuangan provinsi di Indonesia masih tergolong rendah, dengan rata-rata sebesar 16,84% (Ritonga & Syamsul, 2016).

Studi lain oleh Insani dan Ritonga (2017) menganalisis tingkat transparansi pada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Sulawesi. Menggunakan dokumen pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2015 dan 2016, penelitian ini menemukan bahwa peringkat transparansi tertinggi di Sulawesi pada tahun 2015 hanya 14,83%, yang kemudian menurun menjadi 10,92% tahun 2016. Selain itu, tingkat keterbukaan informasi anggaran di Sulawesi dikategorikan sebagai "Tidak Cukup" (*insufficient*), mengindikasikan adanya defisit transparansi informasi anggaran (Insani & Ritonga, 2017). Lebih lanjut, penelitian Suwarsih & Ritonga (2017) yang dilakukan pada 164 pemerintah daerah di Sumatra melalui 157 situs resmi untuk tahun anggaran 2015 dan 2016. Hasilnya konsisten dengan temuan sebelumnya, rata-rata indeks transparansi di Sumatra untuk tahun 2015 adalah 13,79% dan turun menjadi 9,39% di tahun 2016. Kategorisasi keterbukaan informasi publik menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Sumatra, baik pada tahun 2015 maupun 2016, berada pada kategori *insufficient* (Suwarsih & Ritonga, 2017). Adriana & Ritonga (2018) memfokuskan studi pada situs resmi pemda di Jawa tahun anggaran 2016. Meskipun Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tingkat transparansi yang relatif tinggi sebesar 58,02%, beberapa daerah lain, seperti Madiun, mencatat tingkat terendah yaitu 3,04%. Secara keseluruhan, rata-rata indeks transparansi di Pulau Jawa masih tergolong rendah, yakni 19,59% (Adriana & Ritonga, 2018). Nurhadianto & Khamisah (2019) juga mengkaji transparansi pemerintah kabupaten/kota Provinsi Lampung untuk tahun anggaran 2016. Hasilnya menunjukkan tingkat transparansi yang sangat rendah, dengan rata-rata hanya 5,95%, dikategorikan sebagai



"scant or none" (Nurhadianto & Khamisah, 2019). Terakhir, Welly *et al.* (2021) meneliti pemerintah provinsi di Jawa-Bali dan menemukan bahwa tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah di wilayah tersebut masih sangat rendah, yaitu 28,37% (Welly *et al.*, 2021).

Selain penelitian-penelitian terkait transparansi pengelolaan keuangan daerah, penelitian yang mencoba untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia juga cukup banyak dilakukan. Pertama, penelitian Siagian *et al* (2016) yang melakukan penelitian di Kabupaten Asahan, menggunakan metode kuantitatif dengan 124 orang responden. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Asahan belum terlaksana secara efektif dan efisien yang disebabkan oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas (Siagian *et al.*, 2016). Kedua, Siregar dan Muslih (2018) menganalisis Pemerintah Kota Yogyakarta untuk periode 2015-2017, menemukan penurunan indeks transparansi selama rentang waktu tersebut. Meskipun efektivitas pengelolaan keuangan menunjukkan hasil positif, indikator efisiensi justru menurun (Siregar & Muslih, 2018). Ketiga, penelitian Devinci *et al* (2022) pada BPKAD Kabupaten Sikka tahun anggaran 2016-2020 menunjukkan pengelolaan keuangan yang cukup efektif di Kabupaten Sikka, dengan rata-rata nilai efektivitas sebesar 96,48%, namun kurang efisien dalam mengelola keuangannya, karena memiliki nilai rata-rata efisiensi lebih dari 80%, yaitu sebesar 97,50% (Devinci *et al.*, 2022). Studi terakhir oleh Rahman dan Saputra (2022) yang dilakukan di Kabupaten Cilacap selama periode 2016-2020, menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di daerah tersebut secara umum baik, dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 106,35% (sangat efektif) dan rata-rata efisiensi 3,37% (sangat efisien) (Rahman & Saputra, 2022). Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan tingkat transparansi, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan di berbagai daerah di Indonesia yang cukup variatif, dengan fokus utama di Pulau Jawa dan Sumatera. Hal ini mengindikasikan adanya gap penelitian terkait kondisi di wilayah lain. Oleh karena itu, penelitian serupa khususnya yang bertujuan menganalisis ketiga aspek tersebut di Sulawesi Tengah menjadi krusial untuk mengisi kekosongan data dan memberikan gambaran komprehensif mengenai kualitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan serta memberikan rekomendasi perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, efektif, dan efisien khususnya di Sulawesi Tengah.

TINJAUAN LITERATUR

New Public Management (NPM) dan Teori Keagenan (Agency Theory)

New Public Management (NPM) lahir sebagai respons atas lemahnya birokrasi tradisional yang sering kali bersifat lamban, tidak efisien, dan tertutup. NPM mempromosikan praktik manajemen sektor swasta ke dalam sektor publik, dengan menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, pengukuran kinerja, serta transparansi sebagai wujud akuntabilitas publik (Hood, 1995). Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, NPM mendorong pemerintah untuk bertindak sebagai "manajer" yang mengelola sumber daya publik secara optimal agar mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

Di sisi lain, *Agency Theory* (teori keagenan) adalah teori yang banyak digunakan untuk menganalisis konflik dan hubungan antar dua pihak, *principal* (pemberi tugas, seperti masyarakat atau legislatif) dan *agent* (pelaksana tugas, seperti manajemen dan pemerintah daerah) dimana *principal* mendelegasikan atau mempekerjakan *agent* untuk melakukan pekerjaan demi kepentingan terbaik *principal*, termasuk dalam pengambilan keputusan (Hendrastuti & Harahap, 2023). Teori keagenan berasumsi bahwa sumber utama perilaku



yang ditunjukkan oleh pemerintah umumnya dipusatkan pada diri sendiri dan motivasi dari luar seperti peraturan dan undang-undang (Schillemans & and Bjurstrøm, 2020). Teori ini menekankan bahwa adanya pemisahan peran antara pemilik dan pengelola berpotensi menciptakan konflik kepentingan dan asimetri informasi, sehingga perlu adanya mekanisme pengendalian, pengawasan, dan kontrak insentif untuk meminimalkan perilaku oportunistik *agent* (Jensen & Meckling, 1976).

Dalam konteks pemerintahan daerah, pemerintah sebagai agen sering kali memiliki informasi lebih banyak daripada masyarakat sebagai prinsipal, sehingga meningkatkan risiko *moral hazard* jika tidak ada pengawasan dan transparansi (Narastri, 2022). Kesenjangan informasi ini dapat menyebabkan masalah, seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap tatakelola dan kinerja pemerintah. Kaitan antara NPM dan Teori Keagenan sangat erat karena NPM menyediakan kerangka untuk memperbaiki hubungan *principal-agent* di sektor publik. Penerapan prinsip-prinsip NPM, seperti transparansi, efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan, bertujuan untuk mengurangi masalah keagenan, khususnya terkait asimetri informasi dan *moral hazard*. Dengan kata lain, NPM mencoba memperkuat posisi masyarakat sebagai *principal* melalui mekanisme akuntabilitas publik dan transparansi, agar pemerintah tidak bertindak semata-mata untuk kepentingannya sendiri (Van Thiel & Leeuw, 2002). Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan transparansi berbasis website dan pelaporan keuangan secara daring, seperti yang ditunjukkan di indeks-indeks transparansi pemerintah daerah, mampu mengurangi jarak informasi antara pemerintah dan masyarakat (Araujo & Tejedo-Romero, 2016). Hal ini mendukung teori keagenan yang menyatakan bahwa semakin terbuka informasi, semakin kecil peluang pemerintah untuk bertindak menyimpang dari kepentingan masyarakat. Penelitian Martani *et al.* (2014) bahkan menemukan bahwa transparansi fiskal dan kinerja daerah yang dipublikasikan secara online berkorelasi positif dengan persepsi publik terhadap kinerja pemerintah (Martani *et al.*, 2014).

Dengan demikian, integrasi pendekatan NPM dan teori keagenan dalam analisis pengelolaan keuangan daerah sangat relevan, terutama dalam upaya membangun tata kelola yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. NPM menawarkan instrumen manajerial untuk mengatasi masalah keagenan, sementara teori keagenan memberikan kerangka konseptual untuk memahami relasi kekuasaan dan tanggung jawab antara masyarakat dan pemerintah. Kombinasi keduanya tidak hanya memperkuat legitimasi pemerintah daerah, tetapi juga meningkatkan kualitas tata kelola publik secara keseluruhan (Miller, 2005).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode *content analysis* untuk menganalisis transparansi, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan pada 13 pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Data pengelolaan keuangan daerah diperoleh dari situs web resmi masing-masing pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2023. Transparansi diukur berdasarkan ketersediaan, aksesibilitas, dan ketepatan waktu informasi, sementara efektivitas dan efisiensi diukur menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi. Pengukuran transparansi pengelolaan keuangan daerah diukur berdasarkan tiga tahap utama: perencanaan (10 indikator), pelaksanaan (9 indikator), dan pelaporan dan pertanggungjawaban APBD (10 indikator), total 29 indikator. Pengukuran menggunakan instrumen Ritonga & Syamsul (2016), meliputi: ketersediaan informasi; aksesibilitas (unduh publik); dan ketepatan waktu penyajian informasi (Ritonga & Syamsul, 2016).



Ketersediaan artinya informasi yang dibutuhkan tersedia untuk umum di situs resmi pemerintah daerah. Aksesibilitas berarti bahwa informasi tersebut dapat diunduh oleh publik tanpa melewati prosedur yang sulit. Sedangkan ketepatan waktu artinya informasi yang dibutuhkan disediakan di situs resmi pemerintah sesuai dengan waktu yang disyaratkan.

Indeks transparansi keuangan daerah dihitung dengan memberi skor 1 untuk informasi tersedia dan 0 untuk informasi yang tidak tersedia. Ketersediaan dan aksesibilitas masing-masing dibobot 25% (0,25), sementara ketepatan waktu dibobot 50% (0,5). Selanjutnya tingkat transparansi yang didapat dari total skor dibagi skor maksimum per indikator. Peningkatan akhir menggunakan kategori *Open Budget Index* (OBI).

Tabel 1. Kategori Transparansi *Open Budget Index* (OBI)

No	Tingkat Keterbukaan	Kategori	Skor
1	Cukup (<i>Sufficient</i>)	Ekstensif (<i>Extensive</i>)	81-100
		Substansial (<i>Substansial</i>)	61-80
2	Tidak Cukup (<i>Insufficient</i>)	Terbatas (<i>Limited</i>)	41-60
		Minimal (<i>Minimal</i>)	21-40
		Sedikit (<i>Scant or None</i>)	0-20

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah diukur menggunakan rasio efektivitas dengan membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja pemerintah daerah. Pengukuran rasio efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan pedoman penilaian kinerja keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dapat dikatakan efektif jika memenuhi kriteria berikut:

Tabel 2. Kriteria Efektivitas

Presentase	Keterangan
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
70% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Efisiensi pengelolaan keuangan daerah diukur menggunakan rasio efisiensi dengan membandingkan output/keluaran yaitu realisasi anggaran belanja langsung dengan input/atau masukan yaitu realisasi anggaran belanja. Pengukuran rasio efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan pedoman penilaian kinerja keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dapat dikatakan efektif jika memenuhi kriteria berikut:

**Tabel 3. Kriteria Efisiensi**

Presentase	Keterangan
>100%	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
70% - 80%	Efisien
<60%	Sangat Efektif

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Penelitian ini mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Sulawesi Tengah berdasarkan tiga tahapan utama: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban APBD. Data dikumpulkan dari situs resmi kabupaten/kota di Sulawesi Tengah yang ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 4. Daftar Situs Resmi Kabupaten/Kota Sulawesi Tengah

No	Pemerintah Daerah	Situs
1	Kota Palu	https://palukota.go.id
2	Kabupaten Donggala	https://donggala.go.id
3	Kabupaten Sigi	https://www.sigikab.go.id
4	Kabupaten Parigi Moutong	https://www.parigimoutongkab.go.id
5	Kabupaten Poso	https://posokab.go.id
6	Kabupaten Tojo Unauna	https://tojounauna.go.id
7	Kabupaten Banggai	https://banggaikab.go.id/#8
8	Kabupaten Banggai Kepulauan	https://banggaikep.go.id
9	Kabupaten Banggai Laut	https://www.banggailautkab.go.id
10	Kabupaten Morowali	https://morowalikab.go.id
11	Kabupaten Morowali Utara	https://www.morowaliutarakab.go.id
12	Kabupaten Tolitoli	https://www.tolitolikab.go.id
13	Kabupaten Buol	https://webs.buolkab.go.id

Tahap Perencanaan

Analisis transparansi pengelolaan keuangan daerah pada aspek perencanaan (Lihat Tabel 5) menunjukkan bahwa Kabupaten Banggai Laut dan Morowali Utara memiliki skor tertinggi (95%). Kabupaten Donggala dan Morowali menyusul dengan 85%. Sebaliknya, Kabupaten Toli-Toli memperoleh skor terendah (30%), sementara delapan kabupaten/kota lainnya (Palu, Sigi, Parigi Moutong, Poso, Tojo Unauna, Banggai, Banggai Kepulauan, Buol) mencatat skor 50%. Indikator yang paling sering terpenuhi adalah Kebijakan Umum Anggaran, Ringkasan RKA SKPD, dan Perda Penjabaran APBD (rata-rata indeks 0,65). Adapun informasi Perda APBD dan DPA PPKD merupakan indikator yang paling jarang dipenuhi (rata-rata indeks 0,54).

Perbedaan hasil ini selaras dengan konsep *New Public Management* (Hood, 1995) yang menekankan pentingnya sistem pelaporan terintegrasi dan akses informasi publik. Daerah dengan skor tinggi telah mengimplementasikan prinsip-prinsip ini melalui penerapan



e-budgeting dan publikasi dokumen perencanaan secara *real-time*. Dari sisi lain, keberhasilan Kabupaten Banggai Laut didukung oleh adanya tim khusus yang menangani sistem informasi keuangan berbasis web serta program pelatihan SDM secara berkala (Bonsón *et al.*, 2012). Sebaliknya, Kabupaten Toli-Toli menghadapi kendala infrastruktur, seperti jaringan internet yang tidak stabil dan keterbatasan anggaran untuk pengembangan sistem informasi, yang menghambat proses pembaruan data (Ritonga & Syamsul, 2016). Temuan ini menunjukkan bahwa kesiapan teknologi dan kapasitas SDM merupakan salah satu faktor penentu dalam transparansi perencanaan anggaran.

Tabel 5. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahap Perencanaan

Pemerintah Daerah	Indikator										Total	Indeks (%)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Kota Palu	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5	50
Kabupaten Donggala	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	8,5	85
Kabupaten Sigi	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5	50
Kabupaten Parigi Moutong	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5	50
Kabupaten Poso	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5	50
Kabupaten Tojo Unauna	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5	50
Kabupaten Banggai	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5	50
Kabupaten Banggai Kepulauan	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5	50
Kabupaten Banggai Laut	1	1	1	1	1	1	0,5	1	1	1	9,5	95
Kabupaten Morowali	0,5	1	0,5	1	1	0,5	1	1	1	1	8,5	85
Kabupaten Morowali Utara	1	1	1	1	1	0,5	1	1	1	1	9,5	95
Kabupaten Toli-Toli	0	0,5	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0,5	0	3	30
Kabupaten Buol	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5	50

Keterangan: Daftar indikator 1-10 tahap perencanaan dapat dilihat lampiran penelitian ini.

Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan (Lihat Tabel 6), Kabupaten Banggai Laut menempati posisi teratas dengan skor sempurna (100%). Tiga kabupaten lain (Donggala, Morowali, dan Morowali Utara) mencapai skor di atas 77,78%, sementara sisanya di bawah 70%, dengan Toli-Toli menjadi yang terendah (38,39%). Indikator yang paling sering terpenuhi adalah Realisasi Pendapatan Daerah, Realisasi Belanja Daerah, dan Rencana Umum Pengadaan (rata-rata indeks 1), sedangkan Rancangan Perubahan APBD adalah yang paling jarang terpenuhi.

Tabel 6. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahap Pelaksanaan

Pemerintah Daerah	Indikator										Indeks (%)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total	
Kota Palu	1	1	0.5	0	0.5	0	0	1	0.5	4.5	50



Kabupaten Donggala	1	1	0,5	0,5	1	1	1	1	0	7	77,78
Kabupaten Sigi	1	1	0	0,5	0,5	0,5	0,5	1	0,5	5,5	61,11
Kabupaten Parigi Moutong	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	0,5	6	66,67
Kabupaten Poso	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	0,5	6	66,67
Kabupaten Tojo Unauna	1	1	0,5	0	0,5	0,5	0,5	1	0,5	5,5	61,11
Kabupaten Banggai	1	1	0,5	0	0	0	0	1	0,5	4	44,44
Kabupaten Banggai Kepulauan	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	0,5	6	66,67
Kabupaten Banggai Laut	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100
Kabupaten Morowali	1	1	1	0,5	1	1	0,5	1	0,5	7,5	83,33
Kabupaten Morowali Utara	1	1	1	0,5	1	1	1	1	1	8,5	94,44
Kabupaten Toli-toli	1	1	0	0	0,5	0	0	1	0	3,5	38,39
Kabupaten Buol	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	0,5	6	66,67

Keterangan: Daftar indikator 1-9 tahap pelaksanaan dapat dilihat pada lampiran penelitian ini.

Hasil ini sejalan dengan teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976) yang menyatakan bahwa pelaporan *real-time* dapat mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat. Implementasi sistem *e-budgeting* di Banggai Laut memungkinkan pemantauan realisasi anggaran secara transparan dan akurat (Kim *et al.*, 2005). Selain itu, partisipasi masyarakat melalui LSM dalam pengawasan pelaksanaan anggaran turut berkontribusi terhadap tingginya transparansi di beberapa daerah (Araujo & Tejedo-Romero, 2016). Namun, kendala birokrasi seperti tumpang tindih tugas dan ketidakpatuhan terhadap jadwal pelaporan masih menjadi penghambat utama di daerah dengan skor rendah (Siagian *et al.*, 2016). Temuan ini mengindikasikan bahwa selain faktor teknologi, budaya organisasi dan mekanisme pengawasan juga memengaruhi transparansi pelaksanaan anggaran.

Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Tabel 7 menunjukkan hasil analisis tahap pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah di Sulawesi Tengah yang menunjukkan pola konsisten dengan tahapan sebelumnya dimana Kabupaten Banggai Laut memperoleh skor maksimal yaitu sebesar 10 (100%), diikuti Kabupaten Morowali Utara dengan skor 8 (80%), sementara Kabupaten Toli-Toli memperoleh skor terendah 1,5 (15%) dan kabupaten/kota lainnya berada di kisaran 4,5 (45%) hingga 7,5 (75%). Hasil analisis juga menunjukkan bahwa indikator yang paling banyak dipenuhi pemerintah daerah di Sulawesi Tengah adalah indikator nomor 9 yaitu ketersediaan informasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD dengan rata – rata indeks sebesar 0,85. Sebaliknya, indikator yang paling sedikit dipenuhi adalah indikator nomor 7 yaitu Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah. Secara teoritis, Bastian (2010) menyatakan bahwa pelaporan keuangan yang transparan merupakan indikator utama akuntabilitas sektor publik (Bastian, 2010). Daerah dengan opini WTP dari BPK cenderung memiliki sistem pelaporan yang lebih baik karena telah memenuhi standar akuntansi pemerintah (Sunarti *et al.*, 2017).

Dalam praktiknya, keterbatasan anggaran untuk pengembangan *platform* digital menjadi kendala utama bagi daerah dengan skor rendah (Nurhadianto & Khamisah, 2019). Selain itu, budaya organisasi yang kurang mendukung transparansi turut memengaruhi kelengkapan dan ketepatan waktu pelaporan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya



komitmen politik dan alokasi anggaran yang memadai untuk meningkatkan transparansi pelaporan keuangan daerah.

Tabel 7. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pemerintah Daerah	Indikator										Total	Indeks (%)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Kota Palu	0,5	0,5	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	0,5	6	60
Kabupaten Donggala	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	0,5	6	60
Kabupaten Sigi	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	0,5	5,5	55
Kabupaten Parigi Moutong	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	0,5	5,5	55
Kabupaten Poso	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	0,5	5,5	55
Kabupaten Tojo Unauna	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	4	40
Kabupaten Banggai	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0,5	0,5	1	0,5	5	50
Kabupaten Banggai Kepulauan	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0,5	4,5	45
Kabupaten Banggai Laut	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100
Kabupaten Morowali	1	0,5	1	1	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	7,5	75
Kabupaten Morowali Utara	0,5	1	0,5	0,5	1	1	0,5	1	1	1	8	80
Kabupaten Tolitoli	0	0	0,5	0	0	0,5	0	0	0,5	0	1,5	15
Kabupaten Buol	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0	1	0,5	5	50

Keterangan: Daftar indikator 1-10 tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dapat dilihat pada lampiran penelitian ini.

Selanjutnya Tabel 8 menunjukkan indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban APBD. Kabupaten Banggai Laut memperoleh indeks tertinggi yaitu sebesar 28,5 (98,28%), sedangkan Kabupaten Toli-Toli memperoleh indeks terendah 8 (27,59%). Tabel 8 juga menunjukkan bahwa aspek perencanaan keuangan daerah paling banyak dipenuhi kabupaten/kota di Sulawesi Tengah dengan rata-rata indeks 6,08, diikuti aspek pelaksanaan (6,04) dan pelaporan dan pertanggungjawaban (5,73). Detail metode pengukuran indeks transparansi dapat dilihat dalam penelitian Ritonga & Syamsul (2016).

Tabel 8. Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Sulawesi Tengah

Pemerintah Daerah	Pelaksanaan	Perencanaan	Pelaporan dan Pertanggung jawaban	Total	Indeks (%)
Kota Palu	5	4,5	6	15,5	53,45
Kabupaten Donggala	8,5	7	6	21,5	74,14
Kabupaten Sigi	5	5,5	5,5	16	55,17



Kabupaten Parigi Moutong	5	6	5,5	16,5	56,90
Kabupaten Poso	5	6	5,5	16,5	56,90
Kabupaten Tojo Unauna	4,5	5,5	4	14	48,28
Kabupaten Banggai	5	4	5	14	48,28
Kabupaten Banggai Kepulauan	5	6	4,5	15,5	53,45
Kabupaten Banggai Laut	9,5	9	10	28,5	98,28
Kabupaten Morowali	8,5	7,5	7,5	23,5	81,03
Kabupaten Morowali Utara	9,5	8,5	8	26	89,66
Kabupaten Tolitoli	3	3,5	1,5	8	27,59
Kabupaten Buol	5	6	5,5	16	55,17
Rata-rata	6,04	6,08	5,73	17,81	61,41

Kategori Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Menggunakan Open Budget Index (OBI)

Hasil analisis pengkategorian tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan OBI dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan OBI

No	Tingkat Keterbukaan	Kategori	Skor	Jumlah Kabupaten/kota
1	Cukup (<i>Sufficient</i>)	Ekstensif (<i>Extensive</i>)	81-100	3
		Substansial (<i>Substansial</i>)	61-80	1
2	Tidak Cukup (<i>Insufficient</i>)	Terbatas (<i>Limited</i>)	41-60	8
		Minimal (<i>Minimal</i>)	21-40	1

Tabel 9 menunjukkan bahwa terdapat empat pemerintah daerah di Sulawesi Tengah yang memperoleh tingkat keterbukaan cukup (*sufficient*) dengan rincian tiga pemerintah daerah dalam kategori ekstensif (*extensive*) dengan skor indeks berkisar antara 81-100 yaitu Kabupaten Morowali (81,03%), Kabupaten Morowali Utara (89,66%) dan Kabupaten Banggai Laut (98,28%) serta satu pemerintah daerah dalam kategori substansial (*substansial*) dengan skor indeks berkisar antara 61-80 yaitu Kabupaten Donggala (74,14%).

Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa terdapat sembilan pemerintah daerah di Sulawesi Tengah yang memperoleh tingkat keterbukaan tidak cukup (*insufficient*) dengan rincian delapan dalam kategori terbatas (*limited*) dengan skor indeks berkisar antara 41-60 yaitu Kabupaten Tojo Unauna (48,28%), Kabupaten Banggai (48,28%), Kota Palu (53,45%), Kabupaten Banggai Kepulauan (53,45%), Kabupaten Sigi (55,17%), Kabupaten Buol (55,17%), Kabupaten Parigi Moutong (56,90%) dan Kabupaten Poso (56,90%) serta satu pemerintah daerah dalam kategori minimal (*minimal*) dengan skor indeks berkisar antara 21-40 yaitu Kabupaten Toli-Toli (27,59%).

Menurut Adriana & Ritonga (2018) keberhasilan ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan sanksi bagi daerah yang tidak mempublikasikan laporan keuangan (Adriana & Ritonga, 2018). Meskipun demikian, masih terdapat disparitas yang



signifikan antar daerah dalam hal transparansi. Sebanyak 80% kabupaten/kota telah mengadopsi teknologi *open data* (Bastian, 2010), tetapi implementasinya belum optimal karena keterbatasan infrastruktur dan SDM. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan tegas dari pemerintah provinsi dapat mendorong peningkatan transparansi, namun harus didukung dengan peningkatan kapasitas teknis di tingkat daerah.

Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 10 menunjukkan hasil perintah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah memiliki rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 93% dan berada pada kategori efektif. Pemerintah Kabupaten Banggai Laut yang sebelumnya memperoleh skor indeks transparansi tertinggi (98,28%) memiliki tingkat efektivitas pengelolaan keuangan sebesar 91%, sedangkan Kabupaten Toli-Toli yang memperoleh skor indeks transparansi terendah (27,59%) memiliki tingkat efektivitas pengelolaan keuangan sebesar 93%.

**Tabel 10. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Sulawesi Tengah Tahun
Anggaran 2023**

No	Pemerintah Daerah	Realisasi Anggaran Belanja	Target Anggaran Belanja	Efektivitas (%)
1	Kota Palu	Rp.1.613.498.345.228	Rp.1.693.833.414.190	95%
2	Kabupaten Donggala	Rp.1.082.917.339.160	Rp.1.169.214.185.311	93%
3	Kabupaten Sigi	Rp.1.307.795.789.549	Rp.1.384.001.169.268	94%
4	Kabupaten Parigi Moutong	Rp.1.265.386.396.984	Rp.1.327.291.766.375	95%
5	Kabupaten Poso	Rp.959.069.448.406	Rp.1.033.262.986.826	93%
6	Kabupaten Tojo Unauna	Rp.294.297.192.356	Rp.315.405.971.191	93%
7	Kabupaten Banggai	Rp.2.304.388.953.228	Rp.2.486.531.212.791	93%
8	Kabupaten Banggai Kepulauan	Rp.849.032.765.461	Rp.936.937.268.812	91%
9	Kabupaten Banggai Laut	Rp.686.131.000.622	Rp.754.259.350.149	91%
10	Kabupaten Morowali	Rp.1.250.162.885.130	Rp.1.355.055.336.663	92%
11	Kabupaten Morowali Utara	Rp.1.306.264.508.871	Rp.1.417.100.225.830	92%
12	Kabupaten Tolitoli	Rp.1.123.200.462.067	Rp.1.207.282.860.725	93%
13	Kabupaten Buol	Rp.922.479.202.249	Rp.966.416.575.841	95%
Rata-rata				93%

Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang mencapai 93%, menunjukkan bahwa realisasi anggaran secara umum sesuai dengan target yang ditentukan. Keberhasilan ini didukung oleh penerapan perencanaan anggaran berbasis *bottom-up* (Mardiasmo, 2009) dan mekanisme pemantauan berkala. Pendekatan partisipatif dalam penyusunan anggaran memungkinkan penyerapan aspirasi masyarakat secara lebih baik. Namun, beberapa kendala masih ditemukan dalam implementasinya, terutama terkait proyek yang tidak tepat sasaran akibat perubahan kebijakan di tengah tahun anggaran. Ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan sering terjadi karena faktor administratif dan teknis. Temuan ini



mengindikasikan bahwa peningkatan efektivitas tidak hanya membutuhkan perencanaan yang matang, tetapi juga konsistensi dalam pelaksanaan.

Analisis Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil analisis efisiensi pengelolaan keuangan daerah yang ditunjukkan pada tabel di bawah memperlihatkan perintah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah memiliki rata-rata tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah sebesar 94% dan berada pada kategori kurang efisien. Pemerintah Kabupaten Banggai Laut yang sebelumnya memperoleh skor indeks transparansi tertinggi (98,28%) memiliki tingkat efisiensi pengelolaan keuangan sebesar 84% berada pada kategori cukup efisien, sedangkan Kabupaten Toli-Toli yang memperoleh skor indeks transparansi terendah (27,59%) memiliki tingkat efisiensi pengelolaan keuangan sebesar 82% berada pada kategori cukup efisien.

Tabel 11. Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah di Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023

No	Pemerintah Daerah	Realisasi Anggaran Belanja Langsung	Realisasi Anggaran Belanja	Efektivitas (%)
1	Kota Palu	Rp.1.580.961.469.069	Rp.1.613.498.345.228	98%
2	Kabupaten Donggala	Rp.1.067.331.216.114	Rp.1.082.917.339.160	99%
3	Kabupaten Sigi	Rp.1.048.866.078.835	Rp.1.307.795.789.549	80%
4	Kabupaten Parigi Moutong	Rp.1.379.249.469.053	Rp.1.265.386.396.984	109%
5	Kabupaten Poso	Rp.1.108.520.955.971	Rp.959.069.448.406	116%
6	Kabupaten Tojo Unauna	Rp.279.406.900.511	Rp.294.297.192.356	95%
7	Kabupaten Banggai	Rp.1.834.769.624.400	Rp.2.304.388.953.228	80%
8	Kabupaten Banggai Kepulauan	Rp.661.670.121.783	Rp.849.032.765.461	78%
9	Kabupaten Banggai Laut	Rp.577.806.270.620	Rp.686.131.000.622	84%
10	Kabupaten Morowali	Rp.1.656.864.046.018	Rp.1.250.162.885.130	133%
11	Kabupaten Morowali Utara	Rp.1.033.660.016.837	Rp.1.306.264.508.871	79%
12	Kabupaten Tolitoli	Rp.919.393.371.943	Rp.1.123.200.462.067	82%
13	Kabupaten Buol	Rp.878.625.509.322	Rp.922.479.202.249	95%
Rata-rata				94%

Tingkat efisiensi sebesar 94% termasuk kategori kurang efisien. Analisis menunjukkan bahwa tingginya belanja tidak langsung, khususnya untuk gaji pegawai, menjadi faktor utama rendahnya efisiensi (Devinci *et al.*, 2022). Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek dan kurang optimalnya sistem evaluasi kinerja. Temuan ini menyoroti reformasi dalam struktur belanja daerah dan penguatan mekanisme pengawasan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Opini BPK dengan Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Salah satu indikator pertanggungjawaban keuangan dari penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah opini audit yang dikeluarkan oleh BPK (Nurhadianto &



Khamisah, 2019). Opini audit yang diberikan oleh BPK adalah salah satu indikasi tercapainya kinerja keuangan yang baik (Sunarti *et al.*, 2017). Menurut Puspitasari & Adil (2020) opini audit yang baik dapat menggambarkan tingkat akuntabilitas dan kualitas LKPD serta berkaitan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (Puspitasari & Adil, 2020). Opini audit BPK Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 ditunjukkan pada Tabel 12 berikut.

Tabel 12. Opini Audit BPK Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah

No	Pemerintah Daerah	Opini
1	Kota Palu	WTP
2	Kabupaten Donggala	WDP
3	Kabupaten Sigi	WTP
4	Kabupaten Parigi Moutong	WDP
5	Kabupaten Poso	WTP
6	Kabupaten Tojo Unauna	WTP
7	Kabupaten Banggai	WTP
8	Kabupaten Banggai Kepulauan	WDP
9	Kabupaten Banggai Laut	WTP
10	Kabupaten Morowali	WTP
11	Kabupaten Morowali Utara	WTP
12	Kabupaten Toli-toli	WTP
13	Kabupaten Buol	WTP

Tabel di atas menunjukkan sepuluh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah mendapat opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, sedangkan tiga kabupaten lainnya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Meskipun hal ini mengindikasikan kualitas laporan keuangan yang baik, namun hasil analisis menunjukkan tidak adanya korelasi antara indeks transparansi dengan opini audit BPK (WTP/WDP). Kabupaten Banggai Laut yang sebelumnya memperoleh indeks transparansi tertinggi (98,28%) dan Kabupaten Toli-Toli yang memperoleh indeks transparansi terendah (27,59%) mendapatkan opini WTP. Hal ini sejalan dengan penelitian Ditasari & Sudrajat (2020) yang menyatakan bahwa opini audit hanya mengevaluasi kewajaran penyusunan laporan keuangan, bukan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Puspitasari & Adil (2020) menjelaskan bahwa fokus penilaian BPK yang lebih mengedepankan kewajaran laporan keuangan daripada kinerja pengelolaan anggaran adalah salah satu penyebabnya (Puspitasari & Adil, 2020). Selain itu, beberapa daerah yang memperoleh opini WTP ternyata tidak secara konsisten mempublikasikan informasi keuangannya (Sukran *et al.*, 2020).

SIMPULAN

Bahwa tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah di Sulawesi Tengah bervariasi secara signifikan antar kabupaten/kota, dengan Kabupaten Banggai Laut dan Morowali Utara menunjukkan kinerja terbaik, sedangkan Toli-Toli berada pada posisi terendah. Faktor utama yang memengaruhi perbedaan ini meliputi ketersediaan infrastruktur teknologi, kapasitas SDM, dan kepatuhan terhadap regulasi. Hasil analisis *Open Budget Index* (OBI) menunjukkan rata-rata transparansi sebesar 61,41% (kategori substansial), lebih tinggi



dibandingkan beberapa wilayah lain di Indonesia. Namun, temuan ini juga mengindikasikan bahwa efisiensi pengelolaan keuangan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pengendalian belanja tidak langsung dan pencegahan penyimpangan anggaran. Penelitian ini juga menemukan bahwa opini audit BPK (WTP/WDP) tidak berkorelasi langsung dengan tingkat transparansi, karena penilaian BPK lebih berfokus pada kewajaran laporan keuangan daripada keterbukaan informasi kepada publik. Hal ini menunjukkan bahwa standar akuntabilitas keuangan daerah belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi yang diharapkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, A., & Ritonga, I. T. (2018). Analysis of Local Financial Management Transparency Based on Websites on Local Government in Java. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 10(1), 13–26. <https://doi.org/10.15294/jda.v10i1.12558>
- Araujo, J. F. F. E. de, & Tejedó-Romero, F. (2016). Local Government Transparency Index: Determinants of Municipalities' Rankings. *International Journal of Public Sector Management*, 29(4). <https://doi.org/10.1108/IJPSM-11-2015-0199>
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik; Suatu Pengantar* (Ketiga). Erlangga.
- Bonsón, E., Torres, L., Royo, S., & Flores, F. (2012). Local e-government 2.0: Social Media and Corporate Transparency in Municipalities. *Government Information Quarterly*, 29(2), 123–132. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2011.10.001>
- Devinci, M. Y., Dekrita, Y. A., & Samosir, M. S. (2022). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Sikka. *Jurnal Projemen UNIPA*, 9(2), 51–70.
- Hendrastuti, R., & Harahap, R. F. (2023). Agency Theory: Review of the Theory and Current Research. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 10(1), 85. <https://doi.org/10.17977/um004v10i12023p085>
- Hirsch, W. Z., & Osborne, E. (2000). Privatization of Government Services: Pressure-Group Resistance and Service Transparency. *Journal of Labor Research*, 21(2). <https://doi.org/10.1007/s12122-000-1050-z>
- Hood, C. (1995). The “New Public Management” in the 1980s: Variations on a Theme. *Accounting, Organizations and Society*, 20(2–3). [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(93\)E0001-W](https://doi.org/10.1016/0361-3682(93)E0001-W)
- Insani, N. G., & Ritonga, I. T. (2017). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Daerah di Sulawesi. *Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(4).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Kim, P. S., Halligan, J., Cho, N., Oh, C. H., & Eikenberry, A. M. (2005). Toward Participatory and Transparent Governance: Report on the Sixth Global Forum on Reinventing Government. *Public Administration Review*, 65(6). <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2005.00494.x>
- Koromath Paulus, J. (2020). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Manokwari. *Lensa Ekonomi*, 11(1).
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.



- Martani, D., Fitriyanti, D., & Annisa. (2014). Financial and Performance Transparency on the Local Government Websites in Indonesia. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 60(3), 504–516.
- Miller, G. J. (2005). The Political Evolution of Principal-Agent Models. In *Annual Review of Political Science* (8; Vol. 8). <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.8.082103.104840>
- Narastri, M. (2022). Principles and Agents: The Phenomenon of Agency Theory In The Business Sector and The Public Sector. *The Strategy of Digitalization in Business for Gaining Competitive Advantages after Pandemic*, 105–109.
- Nurhadianto, T., & Khamisah, N. (2019). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah; Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. *Journal Technobiz*, 3(5), 25–30.
- Puspitasari, A., & Adil, M. (2020). Opini Audit Atas Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan. *SIMAK*, 18(1), 69–83.
- Putri, A. M., Suriyanti, L. H., & Hastanto, A. M. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ekobistek*, 12(1), 486–494. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v12i1.500>
- Rahman, A. Z., & Saputra, F. L. (2022). Efisiensi dan Efektivitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 22(2), 117–126. <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2>
- Ritonga, I. T., & Syamsul. (2016). Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia: Berbasis website. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 110–126. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art4>
- Schillemans, T., & and Bjurström, K. H. (2020). Trust and Verification: Balancing Agency and Stewardship Theory in the Governance of Agencies. *International Public Management Journal*, 23(5), 650–676. <https://doi.org/10.1080/10967494.2018.1553807>
- Shin, R. (2001). Strategies for Economic Development Under Decentralization: A Transformation of the Political Economy. *International Journal of Public Administration*, 24(10). <https://doi.org/10.1081/PAD-100105103>
- Siagian, B. B., Maryunani, Krishna Sakti, R., & Budi Santoso, D. (2016). Efficiency and Effectiveness Analysis Of Village Financial Management (VFM). *International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG)*, 2(2), 136–151. <http://ijleg.ub.ac.id>
- Siregar, H. O., & Muslih, M. (2018). Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Menggunakan Open Budget Index (OBI). *Online Insan Akuntan*, 3(Desember), 161–172. www.igi-global.com].
- South, N., Tinangon, J., & Rondonuwu, S. (2016). Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 4(1), 613–622.
- Sukran, Rajindra, & Yusuf, D. (2020). Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 3(8), 421–429.
- Sunarti, Sarwono, A. E., & Rahmawati. (2017). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Ketidapatuhan Regulasi dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Paradigma*, 19(2), 38–73.
- Suwarsih, A., & Ritonga, I. T. (2017). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Daerah Di Sumatra. *Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(1).



p-ISSN: 2723-1488

e-ISSN: 2723-1399

**JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN TEKNOLOGI
INFORMASI AKUNTANSI**

Available online at: <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA>

- Van Thiel, S., & Leeuw, F. L. (2002). The Performance Paradox in the Public Sector. *Public Performance & Management Review*, 3(25), 267–281. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/3381236>
- Welly, Arifin, M. S., & Ghozali, R. (2021). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Website Se-Jawa Bali. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 157–167. <http://jurnal.um-palembang.ac.id/balance>